



Kasus Hotel Swiss Bell Pintu Masuk Tegakkan Aturan

Investasi Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum

JOGJA, Radar Jogja - Sejumlah pihak memiliki pendapat berbeda dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Susanto Dwi Antoro soal investasi di kota gudeg ini. Kasus dugaan pelanggaran Hotel Swiss Bell yang memanfaatkan tanah negara tidak bisa dipandang sekedar kejadian masa lalu. Barang yang sudah terjadi. Peristiwanya sudah berlangsung seperti pandangan Toro, sapaan akrab Susanto Dwi Antoro. *▶ Baco Kasus... Hal 7*

MENABRAK ATURAN

Penegakan hukum terhadap Hotel Swiss Bell bisa menjadi pintu masuk bagi Satpol PP Kota Jogja bergerak. Menindak hotel dan hunian lainnya yang melanggar dari **714 hotel dan hunian baru 154 yang berizin.** dari **88 toko sejangkring baru 6 yang berizin.**

Kasus Hotel Swiss Bell Pintu Masuk Tegakkan Aturan

Sambungan dari hal 1

Salah satu pihak yang terang-terangan menyatakan tidak sepakat datang dari internal komisi yang dipimpin Toro. Itu seperti dikemukakan Anggota Komisi B Krisma Eka Putra. Dia menegaskan, investasi tidak boleh melanggar aturan. Termasuk pembangunan hotel yang selama 10 tahun terakhir begitu gencar dan masif. "Investasi harus sejalan dengan upaya penegakan hukum. Tidak boleh investasi dilakukan dengan cara-cara melawan hukum," tegas Krisma kemarin (23/12). Dia menilai pendapat yang dikemukakan Toro lebih mencerminkan pandangan pribadi. Krisma mengaku telah melihat secara langsung pelanggaran yang terjadi di Hotel Swiss Bell. Hal itu diketahuinya saat bersama lima anggota Komisi B mengunjungi hotel di Jalan Jenderal Soedirman 89 Jogja itu. Sebagai anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Jogja, Krisma menegaskan sikapnya sangat jelas. Jika kawan-kawannya di Komisi A mendorong Satpol PP Kota Jogja segera mengeksekusi pelanggaran perda dalam konteks investasi, dia merasa senang. "Lakukan saja secepatnya. Karena seharusnya sejak dulu dilakukan. Hotel Swiss Bell hanya satu contoh saja," tegas anggota dewan yang tinggal di kawasan Kadipten, Kraton, Jogja ini. Krisma menambahkan, penegakan hukum terhadap Hotel Swiss Bell bisa menjadi pintu masuk bagi Satpol PP Kota Jogja bergerak. Menindak hotel dan hunian lainnya yang melanggar. Banyak kasus serupa terjadi. Anggota Badan Kehormatan (BK) Dewan Kota ini menyebutkan

laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jogja kepada Komisi B. Datanya dari 714 hotel dan hunian baru, 154 berizin. Dokumentasinya lengkap meliputi IMB dan SLF serta perizinan lainnya. "Tidak ada seputranya yang lengkap izinya," kritik Krisma. Belum lagi toko berjejang. Dari 88 toko hanya enam toko berjejang yang punya izin. Menyikapi itu, hanya ada dua kemungkinan terkait hotel dan hunian ilegal. Pertama, memang karena menabrak aturan. Dengan demikian, secara regulasi tidak memungkinkan diterbitkannya izin. Kedua, ada pejabat yang bermain. Dikatakan, seharusnya Satpol PP bertindak. Krisma yakin Satpol PP mengetahui semua data pelanggaran tersebut. Karena itu, dia mempertanyakan sikap pemkot. "Berani tidak balai kota (wali kota, Red) menertibkan. Kalau mau main drama, berangkat ke Korea saja," sindirnya. Komitmen Satpol PP dalam menangani kasus Hotel Swiss Bell kembali disalatkan Ketua Komisi A Dwi Candra Putra. Dia menyalahkan absennya Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto. Setiap kali Komisi A menggelar rapat kerja membahas Hotel Swiss Bell, Agus belum pernah sekalipun hadir. Ini sangat berbeda dengan kepala OPD lainnya. Di antaranya seperti Kepala BKAD Wasesa, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wahyu Handoyo Hardjono Putro, Plt Inspektur Suhartingsih dan Kabag Hukum Setda Kota Jogja Nindyo Dewanto. Mereka rajin dan selalu datang. "Bapak Kasat izin tidak hadir karena ada kerabatnya yang sakit," ucap Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Satpol PP Dodi Kurnianto memamitkan atasannya. Mendengar itu Candra berakasi. Dia mendorong Kabag Hukum Nindyo Dewanto segera menajadi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja. Saat ini kepala BKPSDM lowong. "Nanti kalau menjadi kepala BKPSDM, tolong Pak Nindyo perbaiki SDM Satpol PP" pintarnya. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja periode 2009-2014 Chang Wendryanto mendukung upaya penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Hotel Swiss Bell. Chang meminta anggota Dewan Kota yang berugas di Komisi A maupun komisi-lainnya terus bersuara. Mendorong penuntasan kasus tersebut. "Tegakkan perda. Kalau melanggar ya harus ditindak," desak mantan ketua LPMK se-Kota Jogja ini. Chang mengingatkan, investasi tidak boleh mengabaikan aturan. Apalagi secara sengaja dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Mengutip pesan Presiden Jokowi, investasi harus dikawal. Pengertiannya investasi harus dilakukan dengan cara-cara yang mematuhi hukum. Sebaliknya, bila pemerintah daerah mempersulit perizinan investasi harus juga ditindak. "Jadi jangan karena dalih investasi, kemudian mengesampingkan penegakan hukum," tegasnya. Dia juga memberikan ilustrasi yang kerap terjadi di lapangan. Masyarakat kecil atau wong cilik dipaksa harus taat hukum. Namun saat bersamaan yang besar dan punya hubungan kekuasaan hendak di perlakukan senaknya sendiri. "Sak enak udule dewe. Kalau seperti itu jelas tidak benar," jelas Chang yang tinggal di Jalan Pa-jeksan 54 Jogja ini. *(kas/laz/fj)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005